



# **ANALISIS PENERAPAN SPBE (SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU MELALUI SIPAMANDAR**

**Nur Annisa<sup>1)</sup>, Rismayanti<sup>2)</sup>, Hari Yeni<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju, Indonesia  
Email: [anisaa0428@gmail.com](mailto:anisaa0428@gmail.com)

<sup>2)</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju, Indonesia  
Email: [rismayantinasaruddin@gmail.com](mailto:rismayantinasaruddin@gmail.com)

<sup>3)</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju, Indonesia  
Email: [hariyeni7@gmail.com](mailto:hariyeni7@gmail.com)

## **Abstract**

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) is a national strategy to improve the effectiveness of governance and the quality of public services. The Mamuju Regency Government has implemented SPBE through the SIPAMANDAR application as a medium for administrative management and data integration between Regional Apparatus Organizations (OPD). This study aims to analyze the effectiveness of SPBE implementation through SIPAMANDAR in terms of policy, institutional, technological infrastructure, human resources, and its impact on public services. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results show that SIPAMANDAR contributes positively to work efficiency, increased administrative transparency, and ease of access to information. However, its implementation has not been optimal due to limitations in integration between OPDs, uneven human resource readiness, unstable network infrastructure, and a lack of socialization to the community. This study concludes that the optimization of SPBE in Mamuju Regency requires strengthening human resource capacity, improving digital infrastructure, and continuous coordination and evaluation across OPDs.

**Keywords:** SPBE, SIPAMANDAR, Management Information System, Digital Government, Public Services.

## **Abstrak**

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan strategi nasional dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Mamuju mengimplementasikan SPBE melalui aplikasi SIPAMANDAR sebagai media manajemen administrasi dan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SPBE melalui SIPAMANDAR ditinjau dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta dampaknya terhadap layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPAMANDAR berkontribusi positif terhadap efisiensi kerja, peningkatan transparansi administrasi, serta kemudahan akses informasi. Namun demikian, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan integrasi antar OPD, kesiapan sumber daya manusia yang belum merata, infrastruktur jaringan yang belum stabil, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi SPBE di Kabupaten Mamuju memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur digital, serta koordinasi dan evaluasi lintas OPD secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** SPBE, SIPAMANDAR, Sistem Informasi Manajemen, Pemerintahan Digital, Pelayanan Publik.



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemanfaatan TIK tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pendukung administrasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terbuka, pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi digital dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia merespons tuntutan tersebut melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam memastikan transformasi digital berjalan secara merata hingga ke tingkat lokal.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju mengimplementasikan kebijakan SPBE melalui pengembangan aplikasi SIPAMANDAR (Sistem Informasi Pemerintahan Mamuju Terpadu). Aplikasi ini dirancang sebagai platform integrasi layanan administrasi dan pengelolaan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan tujuan meningkatkan koordinasi, efektivitas kerja birokrasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui SIPAMANDAR, diharapkan proses administrasi pemerintahan dapat berlangsung lebih cepat, transparan,

dan terstandarisasi, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik.

Namun demikian, implementasi SIPAMANDAR dalam mendukung SPBE di Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet dan perangkat pendukung yang belum merata di seluruh OPD. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan, terutama terkait dengan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem secara maksimal. Di sisi lain, tingkat pemanfaatan aplikasi SIPAMANDAR yang belum konsisten di seluruh OPD mengindikasikan masih adanya resistensi perubahan serta kurangnya integrasi sistem secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal penerapan SPBE dengan realitas implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis implementasi SPBE melalui aplikasi SIPAMANDAR di Kabupaten Mamuju, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SIPAMANDAR di Kabupaten Mamuju. Pendekatan ini



dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan, serta menelaah proses, pola, dan dinamika penerapan SPBE dalam konteks organisasi pemerintahan daerah. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan keadaan aktual, tetapi juga menilai tingkat efektivitas implementasi serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul selama proses penerapan sistem tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses penggunaan aplikasi SIPAMANDAR pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mamuju, serta melalui wawancara mendalam dengan pegawai pemerintah dan aparatur yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi tersebut. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait tingkat pemahaman, kesiapan sumber daya manusia, pola pemanfaatan sistem, serta persepsi aparatur terhadap manfaat dan kendala dalam penerapan SPBE. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, laporan pelaksanaan SPBE, dokumen perencanaan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan e-government dan transformasi digital pemerintahan.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengacu pada model analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel

tematik guna memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan menginterpretasikan data secara mendalam untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi SPBE serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

Fokus penelitian ini diarahkan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mamuju yang telah menerapkan aplikasi SIPAMANDAR sebagai sarana administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Instrumen atau alat penelitian yang digunakan meliputi panduan observasi, panduan wawancara semi-terstruktur, daftar cek evaluasi implementasi SPBE, serta studi dokumentasi. Penggunaan berbagai instrumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedalaman dan keabsahan data, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai implementasi SPBE di Kabupaten Mamuju.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SIPAMANDAR di Kabupaten Mamuju telah dilakukan, tetapi efektivitasnya belum merata di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah telah menetapkan panduan dasar untuk SPBE dan membentuk tim pengelola, namun pelaksanaannya masih belum seragam, sehingga terdapat perbedaan dalam standar operasional di antara OPD. Dalam aspek kelembagaan, sejumlah OPD telah memanfaatkan SIPAMANDAR secara aktif, terutama untuk pengelolaan administrasi surat dan layanan internal, sementara OPD lainnya masih mengandalkan metode konvensional.



Infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet dan perangkat komputer, sudah tersedia di banyak kantor pemerintahan, tetapi kualitas jaringan masih tidak stabil, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Dari segi sumber daya manusia, kemampuan pegawai dalam menggunakan aplikasi bervariasi; beberapa pegawai telah terbiasa dengan sistem digital, sedangkan yang lain masih memerlukan arahan dan pelatihan lebih lanjut. Dalam hal layanan publik, SIPAMANDAR telah mempermudah pengolahan data dan mempercepat administrasi, tetapi aplikasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fitur dan kurangnya sosialisasi. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa meski SIPAMANDAR memberikan pengaruh positif terhadap digitalisasi pemerintah, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan infrastruktur, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta integrasi layanan yang lebih komprehensif.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE melalui platform SIPAMANDAR di Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memberikan dampak positif dalam memperbaiki pengelolaan pemerintahan, namun masih terdapat sejumlah tantangan fundamental yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beragamnya tingkat pemanfaatan SIPAMANDAR di antara OPD menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan SPBE yang ada belum secara merata diadopsi. Perbedaan dalam standar operasional dan minimnya regulasi yang jelas di setiap OPD menyebabkan implementasi SPBE tidak berjalan secara konsisten. Hal ini menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan agar sistem yang diterapkan dapat berfungsi secara harmonis dan mendukung pencapaian tujuan SPBE, yakni efisiensi,

transparansi, dan kualitas dalam layanan publik. Dari segi kelembagaan, peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator SPBE sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya berhasil mendorong semua OPD untuk memaksimalkan penggunaan SIPAMANDAR. Kesenjangan dalam pemanfaatan aplikasi ini mencerminkan bahwa kesiapan institusi masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui peningkatan komitmen pimpinan OPD dalam mendukung dan memantau penggunaan teknologi digital. Di samping itu, koordinasi antara OPD perlu diperkuat agar aliran data, layanan, dan dokumen bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Diskusi juga menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi menjadi salah satu tantangan signifikan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Mamuju. Ketidakstabilan sinyal internet, khususnya di daerah kecamatan dan desa, mengganggu proses kerja dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap efektivitas SIPAMANDAR. Perangkat komputer yang sudah usang dan kurangnya standar keamanan siber juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi. Situasi ini mengindikasikan perlunya investasi tambahan untuk memperkuat infrastruktur digital agar sistem dapat beroperasi dengan lebih stabil dan aman. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam analisis ini. Ketidakmerataan tingkat ketrampilan karyawan menyebabkan pemanfaatan SIPAMANDAR tidak berjalan dengan baik. Karyawan yang kurang terbiasa dengan teknologi digital sering kali melakukan kesalahan saat memasukkan data, lambat dalam menggunakan aplikasi, atau bahkan terpaksa kembali ke cara manual. Kurangnya pelatihan secara teratur menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kemampuan dalam bidang digital ini. Meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan



rutin, dukungan teknis, dan pembinaan internal sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan penerapan SPBE yang berkelanjutan. Dalam rangka layanan publik, SIPAMANDAR sebenarnya memiliki potensi besar untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan kualitas data. Namun, terbatasnya fitur layanan publik yang ada dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat menjadikan tingkat pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE memerlukan penguatan tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Inisiatif edukasi digital, penyediaan pusat layanan bantuan, serta pengembangan antarmuka aplikasi yang lebih intuitif dapat berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan layanan digital oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SIPAMANDAR di Kabupaten Mamuju telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital ini mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi ketergantungan pada dokumen manual, serta meningkatkan keterlacakan data dan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE menjadi langkah strategis dalam mendorong modernisasi birokrasi dan perbaikan kualitas layanan publik di tingkat daerah.

Meskipun demikian, hasil implementasi SIPAMANDAR belum sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet yang belum merata serta ketersediaan perangkat pendukung

yang masih terbatas di beberapa OPD. Kondisi ini berdampak pada ketidakseragaman pemanfaatan sistem dan berpotensi menghambat kelancaran proses kerja berbasis elektronik. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan infrastruktur menjadi prasyarat penting dalam mendukung keberlanjutan SPBE.

Selain aspek infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi SPBE. Masih terdapat aparatur yang belum memiliki kompetensi teknis dan pemahaman yang memadai dalam mengoperasikan serta memanfaatkan SIPAMANDAR secara optimal. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis dapat menyebabkan sistem tidak dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur melalui program peningkatan kompetensi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas SPBE adalah belum optimalnya integrasi layanan dan data antar OPD. Sistem yang berjalan secara parsial berpotensi menimbulkan duplikasi data dan mengurangi efisiensi koordinasi antar unit kerja. Integrasi yang menyeluruh diperlukan agar SIPAMANDAR benar-benar berfungsi sebagai sistem pemerintahan terpadu yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini menuntut adanya standar operasional, keseragaman kebijakan, serta komitmen bersama antar OPD dalam memanfaatkan sistem secara terintegrasi.

Secara manajerial, optimalisasi penerapan SPBE melalui SIPAMANDAR memerlukan dukungan komitmen organisasi yang kuat dari pimpinan daerah, disertai dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat juga



perlu didorong agar layanan digital yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik. Dengan sinergi antara aspek teknis, sumber daya manusia, dan tata kelola manajemen yang baik, SPBE di Kabupaten Mamuju diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi pemerintahan dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Shboul, M., et al. (2025). Exploring the impact of information systems on government performance. *International Journal of Public Sector Performance Management*.
- Kementerian Kominfo. (2020). *Panduan Implementasi SPBE*.
- Kementerian PANRB. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE*.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, L., & Putra, A. (2023). Peran sistem informasi manajemen dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. *Jurnal Teknologi & Manajemen*, 12(1), 10–22.
- Sari, P., & Nugroho, T. (2024). Evaluasi implementasi e-government di era digital: studi pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 33–47.
- Yuliani, S., & Prasojo, E. (2021). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*.